

## **BAB IV**

### **ANALISIS SUPERSTRUKTUR: INTERAKTIVITAS WARGANET SAAT TERJADINYA KASUS PEMERKOSAAN**

Superstruktur adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks atau wacana. Koherenitas teks wacana yang dimaksudkan di sini adalah membahas tentang keterpaduan dan keterkaitan antar-subtopik yang terdapat dalam teks wacana dari banyak warganet atas respon Gerindra dalam kasus pemerkosaan secara skematik atau berdasarkan struktur dan keterkaitan antar unsur teks.

Menurut Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media dalam Jurnal Mutia Soleha, Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun Twitter @nikahasik topik suatu teks akan didukung oleh subtopik lain yang saling mendukung berupa serangkaian fakta hingga membentuk suatu yang koheren.

Dengan begitu terkait penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan beragam interaktivitas dalam bentuk pernyataan-pernyataan langsung dari warganet yang merespon balasan Gerindra atas kasus pemerkosaan. Peneliti pun akan mengemas interaktivitas ini dalam sub-topik yang agar bisa mengidentifikasi wacana secara utuh dengan mudah. Untuk mengetahui keutuhan dan koherenitas teks wacana ini akan dibahas berikut ini.

#### **4.1 Analisis Superstruktur**

Viralnya kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang anak kader Gerindra terjadi pada 19 Mei 2021 kian ramai diperbincangkan, apalagi setelah adanya pernyataan Gerindra. Meski, Gerindra sudah mengatakan lewat perspektif hukum dan aturan. Namun hal ini justru tidak diterima dengan baik dan ditentang oleh para warganet, sehingga antara Gerindra dan warganet terlibat perselisihan panjang. Secara umum, wacana kasus pemerkosaan yang dikaitkan dengan Gerindra membentuk pola interaksi yang skematikal khas komunikasi virtual pada media sosial. Hal ini dimulai dengan akun partai politik yang membalas cuitan berupa teks atau wacana atas pertanyaan yang diajukan oleh warganet. Lalu, wacana dari Gerindra memicu polemik,

sehingga menjadi viral. Setelah viral, membuat interaktivitas yang terjadi sangatlah tinggi.

Pengguna media sosial memang selalu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menginterpretasi teks maupun konten yang ada di media sosial dengan nilai dan persepsi yang berbeda pula. Perbedaan nilai dan persepsi dari setiap individu inilah yang dapat membentuk wacana dari sebuah interaktivitas.

Melalui fitur *reply*, warganet menciptakan interaktivitas yang tinggi atas kasus pemerkosaan ini dan Gerindra diharapkan oleh warganet dapat melakukan tindakan tegas pada kader atas kasus pemerkosaan yang terjadi. Adapun ratusan balasan dari warganet tersebut didukung oleh tiga sub-topik yakni (1) Jawaban Gerindra tidak mengandung empati sehingga terlihat tidak ada keberpihakan dari partai; (2) Ada indikasi bahwa kader Gerindra menyalahgunakan wewenang sehingga terlibat dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan sang anak; (3) Menurunnya citra partai Gerindra yang berdampak pada urusan elektoral 2024.



Gambar 4.1 Teks yang diproduksi oleh @Gerindra

Secara konteks, kasus ini diawali dari salah satu cuitan warganet @soontoberichest, “@Gerindra, min tolong tindak kadernya kesalahannya fatal banget. Kalau admin baca tapi ga nindak, nanti gerindra di doain ga dapet suara pemilu 2024,” ujarnya pada 19 Mei 2021. Cuitan warganet ini pun punya interaktivitas yang tinggi, di mana likes-nya tembus 913. Sementara jumlah *retweets*-nya mencapai 57. Unggahan tersebut pun langsung dibalas dengan cepat oleh Gerindra dengan isi cuitan “Anaknya bukan kader, Kak”

#### 4.2 Sub-Topik 1: Interaktivitas Warganet soal Sikap Negatif Gerindra

Banyak warganet menganggap @Gerindra telah salah dalam memberikan tanggapan dan sikapnya untuk urusan pemerkosaan dengan tidak berempati kepada korban. Adapun, interaksi ini memancing interaktivitas yang tinggi, melalui *likes* dan *retweet*. Jolliffe & Farrington dalam Ayu (2021) mendefinisikan, empati sebagai pemahaman atas status emosional orang lain. Dan dalam hal ini justru yang dilakukan Gerindra, malah sebaliknya. Di mana, Gerindra terus melakukan pembelaan terhadap kader lewat kalimat “Anaknya bukan kader, Kak” dan tidak memberikan cukup respon empati dengan cara mendukung dan membantu korban pelecehan berupa dukungan sosial. Dukungan sosial sendiri adalah tindakan untuk menolong seseorang yang di peroleh melalui hubungan sosial (Norris, 1996).



← Tweet



**Kelima Brd** @BrdKelima · May 20, 2021



Replying to @Gerindra @P3nj3l4j4h\_id and @LinAjah2

Jawaban macam apa ini??

Serius ini admin partai?? Bukannya membalas dengan empati dan keprihatinan, malah justru menyampaikan pembelaan yg ga nyambung.



1



4



**Susi Rawati lie** @susirawatilie · May 20, 2021



Replying to @Gerindra @P3nj3l4j4h\_id and @LinAjah2

gini aja min tuh anggota partai skrng msh jadi anggota DPR . sok2 ngurus Rakyat kan lah dia ngurus 1 anak nya biar kagak jd penjahat aja kagak bisa mau ngurus Rakyat .gerinda kkg ada kader lg .Ini anak bukan hanya pemerkosa tp tuh korban juga dijual kagak ada empati nya loe min.



2



**a** @ceotou · May 20, 2021



Replying to @Gerindra @P3nj3l4j4h\_id and @LinAjah2

sekeren itukah ngejawab, "anaknya bukan kader, kak"???? EMPATINYA MANAA?? Nyesel gue ribut sama temen cuma perkara ngebela-in lu 2019, ga lagi, not respect anymore.



1



6



127



**Fathu Rizal** @fathurizalhblh · May 20, 2021



Mantap kak

Saya juga bingung, enteng bgt bilang "anaknya bukan kader, kak"



1



23



**KRMT Mul Kenthit** @NdoroTedjo · May 21, 2021



Replying to @Gerindra @P3nj3l4j4h\_id and @LinAjah2

Aku tau kamu gak punya wewenang apa apa untuk menindak kasus tersebut min. Tapi, mbok ya ngga kayak gini njawabnya.... Ga politis, ga bijak dan kayaknya kok terkesan ngga ada empati sama sekali... Hhhh....kayak admin baru training aja...



2





Gambar 4.2 Teks yang diproduksi oleh @yoyokusyowo, @BrdKelima, @Mikhaylovich, @felgabriella, @susirawatielie, @NdotTedjo

Ketujuh akun Twitter di atas mempertanyakan di mana empati Gerindra dan meminta Gerindra menggunakan kekuasaannya untuk menindak kader. Lebih jelasnya, menurut @Mikhaylovich, permintaan turut bersimpati kepada korban menjadi hal yang sangat penting untuk merespons kejadian pemerkosaan. Bagi @Mikhaylovich dibanding menjawab “*Anaknya bukan kader, Kak*” sebaiknya Gerindra memberi motivasi dan semangat kepada korban untuk mendapatkan keadilan sembari berkomitmen untuk mengawal proses tersebut. Karena, apabila langsung menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada kepolisian, tanpa ikut proses pengawalan, itu sama saja dengan tidak mempedulikan sehingga terkesan meremehkan pengalaman pemerkosaan korban.

Akun @NdotTedjo pun memahami bahwa Gerindra tidak punya wewenang untuk menindak kasus pemerkosaan ini. Tapi, dia menyoroti bagaimana jawaban Gerindra tidak terkesan punya empati sama sekali. Cuitan “*ga politis, ga bijak*” punya maksud bahwa tidak ada upaya dari Gerindra untuk bisa menjawab secara politis, yakni mewujudkan kebaikan bersama dan arti sikap bijak, artinya tidak mampu membaca situasi dengan cermat dan mengambil sikap yang menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap korban pemerkosaan. Sehingga, jawaban-jawaban yang telah dicuitkan oleh Gerindra menghasilkan hasil yang ambigu dan tidak meyakinkan. Menurut Kusumaningtyas (2021) adanya sikap menyalahkan korban, mempertanyakan kredibilitas korban, menyiratkan bahwa korban pantas diperkosa, merendahkan korban, begitupun dengan memberikan jawaban yang ambigu, ini seakan meremehkan pengalaman pemerkosaan. Hal tersebut kian membuktikan adanya ketidakberpihakan

suatu pihak dan itu tentu akan mengurangi sensitivitas dan empati terhadap korban sehingga akan menghambat proses pemberian bantuan/layanan yang efektif.

Adapun, tindakan yang dilakukan tersebut akan berdampak kepada seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Sejumlah besar penelitian telah meneliti hasil sosial dan psikologis secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang diperkosa lebih mungkin mengalami rience depresi, kecemasan, dan gejala traumatis dibandingkan dengan bukan korban (Thompson & West 1992 dalam Jurnal Socia Logica, Kusumaningtyas *Sikap Terhadap Korban Perkosaan Akibat Gender, Ras, Agama, Dan Kelas Sosial*). Namun, dampak pemerkosaan terhadap perempuan tidak terbatas pada tindakan itu sendiri. Sebaliknya, apa yang disebut viktimisasi sekunder dapat dihasilkan dari pengalaman negatif dalam kelompok sosial seseorang atau dengan pihak berwenang yang mungkin memiliki sikap negatif terhadap korban pemerkosaan.



Gambar 4.3 Teks diproduksi oleh @IdrusHusein, dan @TorroJKT599

Akun @IdrusHusein pun mengatakan “*setidaknya lu sebagai partai bekerjasama dalam mengusut permasalahan sosial dong. Lo ngemis suara rakyat tapi disaat ada permasalahan rakyat, lu pada kemana partai anjing*” tweet dari Idrus ini memberi gambaran kuat soal harapan warganet kepada Gerindra soal kasus pemerkosaan. “*Lo ngemis suara rakyat tapi disaat ada permasalahan rakyat, lu pada kemana partai anjing*” ini bermaksud, partai politik sejak dahulu memang selalu terkenal meminta dukungan rakyat yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut. Kinerja partai politik selama ini hanya berusaha mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingan elite dan golongannya. Seringkali elite menggunakan masyarakat sekedar sebagai alat kepentingan untuk mencapai tujuan politik. Tidak jarang masyarakat kelas bawah harus berada di garis depan berhadapan tanpa tahu akar permasalahan. Elite politik masih kuasa dalam menentukan konflik, arah dan dinamika politik (Firmanzah 2012: 314). Kontestasi meraih kekuasaan ditampilkan dengan vulgar melalui proyek politik pencitraan semu dan mengandalkan pragmatisme dalam meraih kekuasaan. Praktik politik transaksional dapat menodai hasil pemilu yang diharapkan menghasilkan Indonesia maju dan beradab Budianto (2017).

Maka, bagi pemilik akun Idrus ini ketika keinginan itu terwujud, seharusnya partai pun melakukan timbal balik memberi dukungan dan tuntutan saat terjadi suatu kasus serius yakni pemerkosaan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan menginformasikan prosedur proses hukum yang dijalani hingga tuntas.

Bahkan akun @ToroJKT599 mengungkapkan “*yaudah kita buat keruh aja sekalian,*” bermaksud bahwa dengan citra Gerindra yang sudah buruk, maka warganet bisa dengan leluasa melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Gerindra dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum bahwa Gerindra memang bukanlah partai yang punya empati terhadap kasus pemerkosaan.



Gambar 4.4 Teks diproduksi oleh @demozkratoz

Beberapa jawaban Gerindra pun membuat publik punya persepsi bahwa Gerindra tidak punya empati dalam kasus pemerkosaan. Hal ini dibuktikan oleh salah satu cuitan akun @demozkratoz berupa “*admin @Gerindra cuma bersembunyi dibalik formalitas dengan mengesampingkan etika,*” adapun maksud dari kata ‘*formalitas*’ menurut KBBI adalah sekadar mengikuti tata cara. Dalam hal ini, beberapa jawaban Gerindra terkesan basa-basi, yakni dengan menenangkan warganet bahwa kasus tersebut sedang diusut oleh kepolisian. Sedangkan, di sisi lain Gerindra tidak melakukan pengawalan atas proses hukum pidana. Malah, Gerindra seakan lepas tangan dan langsung menyerahkan tanggung jawab pada kepolisian.

Menurut pemilik akun @demozkratos dalam kasus pemerkosaan, etika harus diutamakan. Olivia (2018) menyebut etika ini berkaitan dengan tindakan manusia yang akan dinilai apakah etis atau tidak. Penting sebuah *etika* dan perlakuan yang baik seperti memberikan empati berupa dukungan terhadap *korban* kekerasan seksual dan melakukan kerja sama dengan pihak berwenang dan selalu memberikan informasi positif di balik kejadian seperti proses hukum yang dijalani hingga tuntas. Tapi, kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Gerindra.



Gambar 4.5 Teks yang diproduksi oleh @itszwnkl @mbabintang dan @Joannicho

Cuitan akun @itszwnkl dan @Joannicho menyoroti bagaimana seharusnya @Gerindra bersikap dengan adanya kasus pemerkosaan, penting sekali punya perspektif untuk melindungi anak korban perkosaan, mengingat kasus kekerasan seksual memiliki dampak yang besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Adanya tweet @Joannicho soal anak di bawah umur yang telah diperkosa 2-3 kali, kemudian diperjualbelikan. Oleh karena itu, bagi warganet penting untuk mengembangkan empati khususnya untuk sebuah partai @Gerindra, karena dampak fisik dan segi psikis korban sudah pasti akan sangat terganggu.

Akun @itszwnkl pun memberikan contoh kalimat yang seharusnya Gerindra sampaikan kepada warganet “*namun kami akan tetap mengawal kasus ini dan posisi Gerindra jelas ada di pihak korban,*” Cuitan ini mendapat interaktivitas berupa likes

sebanyak 21, artinya warganet tidak mempermasalahkan, apabila Gerindra belum memberikan sanksi kepada kader, namun adanya kata “*mengawal*” ini tentu menjadi jawaban yang diharapkan oleh warganet, bahwa Gerindra telah menempatkan kasus pemerkosaan sebagai prioritas. Dengan memiliki empati, seperti memberi dukungan pada korban, maka hal itu akan lebih membuat partai terlihat menuntaskan kasus kekerasan seksual. Dengan memiliki empati, seperti memberi dukungan pada korban, maka hal itu akan lebih membuat partai terlihat punya niat dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual.

Dalam proses konstruksi realitas, Fitriyani (2011) menjelaskan bahwa bahasa adalah unsur utama, baik itu bahasa verbal ataupun non-verbal seperti gambar, grafis, foto, angka, tabel, maupun gerak-gerik. Bahasa merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bagaimana pencitraan yang dilakukan partai politik dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh Gerindra untuk menggambarkan objek atau peristiwa, dalam hal ini pemerkosaan. Bagi warganet, empati yang diperlukan dalam kasus pemerkosaan ini, ialah penggunaan bahasa netral yang tidak mengalami exposure yang berlebihan terhadap kekerasan. Karena, itu tentu akan membuat pembacanya merasa aman dan membuat publik dan utamanya korban percaya bahwa partai politik bisa membantu mereka.

#### **4.3 Sub-Topik 2: Interaktivitas Warganet soal Indikasi Penyalahgunaan Wewenang**

Adanya kontroversi hingga menciptakan interaktivitas yang tinggi antara Gerindra dengan warganet di Twitter, menjadikan ini sebagai ciri-ciri opini publik yang tidak dipercayai oleh rakyat. Meski Gerindra berusaha membentuk opini publik bahwa partai tersebut akan mengusut kader apabila terbukti dengan beragam argument yang berperspektif hukum dan aturan. Namun, sebuah opini publik tidak selalu diterima bulat-bulat oleh masyarakat, melainkan sebaliknya, di mana timbul perdebatan karena perbedaan perspektif dalam banyak sektor di antara publik. Perbedaan partai politik, ideologi, agama, pendidikan, kepentingan dan lain-lainnya ikut memengaruhi munculnya kontroversi di tengah masyarakat.

Dari ratusan teks yang diproduksi, diketahui masing-masing teks punya tujuan berbeda dan juga target yang secara rinci ada pada analisa data mentah. Adapun, teks kali ini menyoroti bagaimana warganet mendesak partai menggunakan kekuasaannya untuk terlibat lebih jauh dalam investigasi kasus pemerkosaan untuk membuktikan bahwa tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang.

Dengan adanya konteks Gerindra tidak memberikan jawaban yang empati bahkan memandang sinis warganet dengan mempertanyakan kembali maksud dari pertanyaan warganet yang terkesan meminta penonaktifan kader atas suatu kesalahan diperbuat anaknya. Maka, peneliti menghubungkannya dalam sub-topik 2, yakni selain kurangnya empati hingga tidak menempatkan kasus sebagai suatu yang *urgent*, faktor kekuatan politis dianggap menjadi penyebab penundaan proses hukum dengan segala celah pembalikan opini di ruang publik. Bukan rahasia umum kondisi hukum ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul.



Gambar 4.6 Teks yang diproduksi oleh @soontoberichest

Misalnya, akun @soontoberich yang menjelaskan bahwa sebaiknya jabatan orang tua tidak dilibatkan. “*Udah jadi rahasia umum kalau hukum kita (Indonesia) sering tumpul ke yang punya kuasa,*” adapun maksud dari cuitan tersebut sebagai salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang

mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum “*timpang sebelah*”.



Gambar 4.7 Teks yang diproduksi oleh @soontoberichest

Adapun, cuitan di atas merupakan hasil interaksi antar warganet, bahwa sang orangtua punya andil dalam membela sang anak dan melakukan intimidasi kepada keluarga korban. Seperti akun Akun @birublueeee yang ikut mempertanyakan di mana

posisi dan peran partai Gerindra terkait kasus pemerkosaan, karena masih melakukan pembelaan terhadap kader padahal sang anak merupakan hasil didikan orang tuanya yakni kader.

Tak hanya itu, akun *Twitter* @the\_hero77 menyebutkan “*Anaknya bukan kader, tapi bapaknya yang kader @Gerindra sudah melindungi anaknya yang pemerkosa. Berarti partai Gerindra sudah melindungi penjahat kelamin.. betul kan pendapat saya?*” Cuitan menjadi unggahan paling atas, di mana mendapat 600 likes dan 46 *retweet* dari para warganet lain. @the\_hero77 menyampaikan bahwa meski anaknya bukan kader, tapi sang orang tua sudah melindungi anaknya yang pemerkosa. Dan apabila dicermati lagi, sang orang tua yang melindungi pelaku pemerkosaan adalah kader dari Gerindra, sehingga dari sini diketahui bahwa seorang kader Gerindra telah melindungi sosok penjahat kelamin dan dengan adanya fakta seperti itu, peran dan posisi partai kembali dipertanyakan. Pemilik akun @terbahagiakan juga menyatakan bahwa orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga tindakan anaknya akan mempengaruhi sang orang tua, ini dibuktikan lewat cuitannya “*iya anaknya bukan kader tapi rapist, nah bapak si rapist ini kader gerindra, min,*”



Gambar 4.8 Teks yang diproduksi oleh @susirawatielie

Warganet juga menyebut bahwa adanya kekuasaan dari orang tua sang pelaku. Hal ini disampaikan melalui akun @susirawatielie, lewat cuitannya @susirawatielie yang mempertanyakan kecermatan dalam melihat urgensi terkait pemberitaan kasus, di mana *korban telah diajak damai oleh sang pelaku*. Artinya, mediasi dua pihak harus

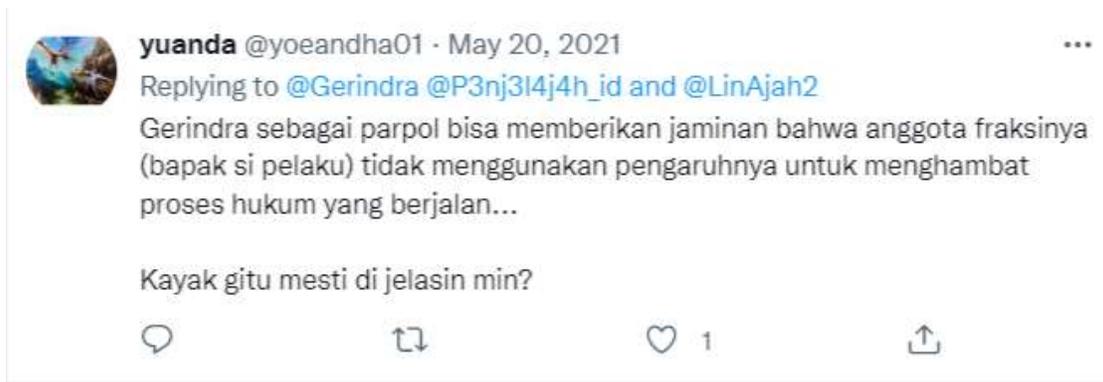
dipertanyakan, apakah ada tekanan dalam prosesnya atau tidak. “*Dia punya duit makanya bisa ngajak damai. Karena, ngerasa bapaknya kader partai. Dan anggota DPR merasa aman karena udah buat si anak ilang,*” hal ini bermaksud apabila laporan itu tiba-tiba dicabut, justru perlu dipertanyakan iktikad baik pelapor, terkait motif lain, misalnya intimidasi dari pelaku dengan sejumlah uang guna membayar kesepakatan damai.



Gambar 4.9 Teks yang diproduksi oleh @yuzar\_iqbal dan @embokembok

Tak hanya itu, beberapa warganet melakukan sindiran keras, seperti yang dilakukan oleh @yuzar\_iqbal, “*keluarganya pasti tau min @gerindra, tolonglah cari!!! proses hukum!!! Jangan damai sini sono dulu. Disekap bosku, kejahatan manusia bos. Bapaknya anggota DPRD lagi ckckck,*” cuitnya. Dari sini, pemilik akun @yuzar\_iqbal merasa apabila telah terjadi kesepakatan damai, maka sang keluarga sudah tentu dilibatkan dan mengetahui. Bahkan akun @embokembok seakan memperkuat dari hasil penelusurannya bahwa pihak keluarga berusaha melakukan tutup mulut dengan uang. Tentu, hal ini merupakan suatu yang memprihatinkan. Bagi

@yuzar\_iqbal, penting untuk melakukan penanganan kejahatan manusia dengan proses hukum, agar mengakibatkan efek jera. Baginya, mekanisme partai harus lebih tegas menghukum kader yang terbukti bermasalah. Idealnya, partai dibentuk untuk bisa menjadi penyalur aspirasi dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat. Bagi warganet, adanya krisis partai politik yang terjadi, maka kemampuan partai mengelola dinamika politik internal sehingga tidak terdengar nyaring keluar perlu ditingkatkan.



Gambar 4.10 Teks yang diproduksi oleh @yoeandha01

Akun @yoenadha01 pun turut *mencuitkan* “Gerindra sebagai parpol bisa memberikan jaminan bahwa anggota fraksinya (bapak si pelaku) tidak menggunakan pengaruhnya untuk menghambat proses hukum yang berjalan,” Beberapa cuitan di atas punya persamaan, di mana sebagai warganet mereka ingin partai Gerindra melakukan proses hukum, karena ditakutkan kader telah menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk melindungi kesalahan sang anak dengan melakukan intimidasi kepada korban.

Maulana (2021) menyebutkan bahwa partai politik berhak membuat keputusan atas penyelesaian masalah internalnya melalui Mahkamah Partai Politik yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai, sehingga terjamin kemandirian Partai Politik dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang salah satu ruang lingkupnya terkait penyalahgunaan kewenangan. “*Parpol bisa memberikan jaminan,*” Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara

otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya, ketika ada kasus hukum kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik.

Adapun, bukti pelaku yang sempat mangkir dua kali dalam pengadilan. Di mana, AT sebagai pelaku masih dalam satu atap rumah. Sehingga, besar kemungkinan dirinya mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Banyaknya warganet yang merespons melalui fitur *reply*, menjadikan interaktivitasnya punya hasil yang sangat tinggi. Diketahui, dalam 1 hari, bisa menghasilkan 400 *tweets* balasan.



Gambar 4.11 Teks yang diproduksi oleh @soontoberichest

Akun @soontoberich setuju bahwa kasus pemerkosaan ini mutlak kesalahan pelaku, yaitu anak kader Gerindra. Namun, dia pun mengingatkan bahwa sebaiknya jabatan orang tua tidak dilibatkan. *“Udah jadi rahasia umum kalau hukum kita (Indonesia) sering tumpul ke yang punya kuasa. Dan alasan kita nge-tag partai adalah karena kita tahu partai punya ‘power’ untuk kasus ini,”* adapun maksud dari cuitan tersebut sebagai salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar atau dalam istilah hukum *“timpang sebelah”*.

Prinsip kemanusiaan juga menjadi pembahasan yang sangat relevan di banyak warganet. Hashela (2017) menyatakan asas *Equality Before The Law* yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (*Rechtsstaat*) seharusnya ada, sebagai bentuk perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*Gelijkheid van ieder voor de wet*). Menurunnya penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam hal ini, karena adanya oknum-oknum yang berwenang yang dapat mengenyampingkan hukum. Dimana oknum-oknum tersebut seharusnya menegakkan hukum, namun kewenangan yang ada padanya disalahgunakan.

Terjadinya banyak anomali, menjadi sebab munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum atau dalam hal ini terhadap partai Gerindra yang menunjukkan sistem dan praktik hukum sedang bermasalah. Cuitan seperti yang disebutkan oleh @shandya menjadi sebuah sindiran terkait jawaban Gerindra yang mengatakan “*Maksudnya partai harus memberikan sanksi kepada orang tua atas kejahatan yang dilakukan anaknya, gitu?*” Dengan menyebutkan teman-teman SMP, *followers IG*, ojek pangkalan, seakan akun @shandya memberi sinyal, bahwa kemungkinan kecil daftar deretan orang-orang tersebut yang membantunya, adapun kemungkinan terbesarnya adalah orang tua yang melakukan intimidasi kepada keluarga korban. Begitupun akun @leeminho\_kw yang mencuitkan bahwa ada kemungkinan besar sang anak membawa orang tua di dalamnya.



Gambar 4.13 Teks yang diproduksi oleh @InaDebbie dan @chil\_90s

Akun tweet @InaDebbie pun mencuitkan walau anaknya bukan kader. Namun, sang pelaku merupakan hasil didikan dari sang orang tua. Dengan begitu, meski kader tidak terlibat, namun partai bisa memainkan peran dengan melakukan tindakan internal. Cuitan ini mendapat interaksi yang tinggi, di mana *likes*-nya mencapai 384 dan *retweets* sebanyak 2 ditambah beberapa komentar dari warganet lain, menandakan bahwa kebanyakan publik yang menunjukkan ketertarikan akan sebuah topik dan memutuskan untuk terus memantau dan melihat informasi yang diberikan @Gerindra terkait kasus pemerkosaan.

#### **4.4 Sub-Topik 3: Interaktivitas Warganet Terkait Urusan Elektoral**

Dari ratusan teks yang diproduksi, diketahui ada beberapa interaksi yang secara jelas telah menunjukkan distrust sebagian bagian akhir teks/wacana terkait sub-topik ketiga yaitu menurunnya citra partai Gerindra dan berdampak pada urusan elektoral 2024 karena adanya kader partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Budianto (2014) menyatakan menurunnya kepercayaan publik bisa disebut dengan distrust publik terhadap partai politik, dan ini berdampak bagi berjalannya proses politik baik dalam pemilu. Bagi Susanto (2009), sebuah krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap baik perusahaan maupun publik. Peristiwa ini mungkin secara cukup berarti merusak organisasi, karyawan, produk dan jasa yang dihasilkan organisasi, kondisi keuangan dan reputasi perusahaan. Menurut Budianto (2009), krisis merupakan suatu kondisi dimana partai mengalami suatu permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, dalam hal ini adalah pemerkosaan yang disebabkan oleh anak dari kader Gerindra dan hal tersebut diperparah dengan pernyataan Gerindra yang dinilai tidak memberikan rasa empati kepada korban.

Hal yang perlu diperhatikan, jumlah pengikut yang besar di media sosial—termasuk popularitas di media—tak selalu bisa diterjemahkan ke kotak suara. Popularitas atau tingkat keterkenalan yang tinggi tidak selalu menjamin tingkat keterpilihan karena ada banyak faktor yang membuat partai dipilih. Sebagai contoh,

yakni Gerindra yang punya *followers* hingga 600 ribu. Secara cepat, akibat tanggapan yang diberikan bersebrangan dengan warganet, kini membuat warganet punya intensi untuk tidak memilih Gerindra. Artinya, pikiran, perasaan dan kesudian subjektif menjadi faktor penentu citra yang ada di khalayak. Kurangnya empati dan tidak tegasnya partai dalam menindak kader pun memberi berpengaruh pada turunnya citra dan membuat Gerindra secara tidak langsung rugi secara elektoral, apalagi mengingat tahun 2024 adalah Pemilu.

Meskipun Gerindra paling agresif dan dekat dengan para *audience* media sosial dan punya interaktivitas yang tinggi di tiap cuitannya, namun citra tersebut runtuh. Lebih dari 300 akun Twitter personal mencuitkan kalimat “*blunder*” atau dengan padanan lainnya seperti “*wrong move*”. Beberapa contohnya seperti ini:





Gambar 4.14 Teks yang diproduksi @YourCurr, @gracepb21, @bananaseaveyy, @hendartoheart, @sarawhatf dan @nitarose38

Melansir dari laman kamus Oxford, blunder didefinisikan sebagai a *stupid or careless mistake* yang berarti kesalahan bodoh atau kesalahan yang ceroboh. Adapun istilah “*wrong/bad move*” yang punya arti salah langkah atau langkah yang buruk. Pada umumnya, ketiga ungkapan ini akan diberikan kepada seseorang yang berperilaku atau mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir panjang. Alhasil, mereka pun akan menerima akibatnya dengan mendapat cap sebagai blunder, baik dari warganet sampai pengamat. Blunder dalam politik biasanya dikaitkan dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh politisi itu sendiri yang pada akhirnya bisa menghancurkan citra baik mereka. Untuk Gerindra sendiri, dengan membuat pernyataan dengan terus berkilah dan tidak memberikan dukungan moral terhadap korban, itu menjadi suatu kesalahan sebagai lembaga politik. Dalam menghadapi situasi itu partai politik harus membuktikan dengan langkah nyata pro terhadap pemberantasan korupsi dengan menindak tegas kader-kader yang terlibat serta memperbaiki kinerja politiknya. Kemudian diperlukan penguasaan masalah dan pengalaman serta ketenangan dalam mengelola krisis sehingga luas dampak krisis dapat dikendalikan.



Gambar 4.15 Teks yang diproduksi oleh @BangBago87

Selanjutnya, akun @Bangbago87 memberi penekanan soal respon dan akibat dari perolehan suara. “*Gua pikir dengan respon cepat si admin dapat respon positif, ini malah respon singkat,*” terdapat unsur harapan atas jawaban Gerindra. Namun, setelah melihat respon singkat berupa “*anaknya bukan kader, Kak*” maka @ketabrakodong2 seakan mempertanyakan soal bagaimana nasib suara Gerindra pada 2024 ini. Di sinilah, yang dimaksud pembentukan opini publik itu bersifat dinamis dan terbentuk sesuai dengan situasi politik.

Zamroni (2013) menyebutkan cakupan pesan politik yang diminati masyarakat kini makin meluas ke arah masalah-masalah kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembentukan opini publik, seharusnya @Gerindra perlu memahami matriks sosial karena setiap peristiwa memiliki alasan serta kondisi sosial masing-masing, termasuk kondisi khalayak pesan politik. Sehingga, seharusnya @Gerindra lebih peka terhadap jaringan dan kondisi sosial masyarakat karena setiap peristiwa terjadi dalam sistem sosial tertentu. Kinerja buruk dari para kader partai politik inilah yang membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.



Gambar 4.16 Teks yang diproduksi @demon\_\_lord dan @DeenRaHS

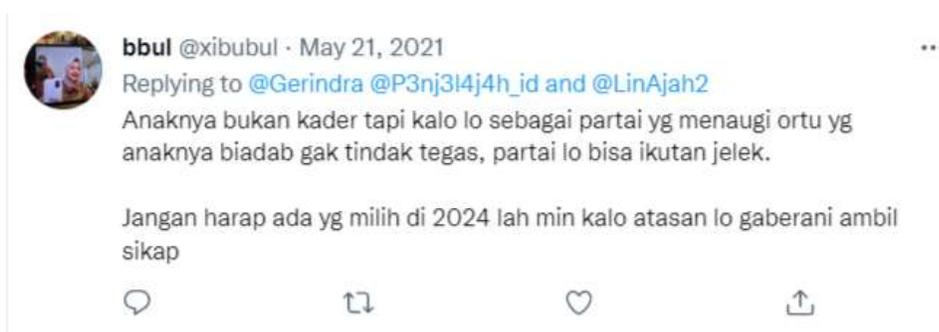
Interaksi serupa juga terjadi di gambar 4.16, cuitan @demon\_\_lord, di mana dirinya membandingkan media kampanye milik Gerindra soal “*siap maju bersama rakyat*” sedangkan yang terjadi pada realita yakni sang pelaku yang merupakan anak kader Gerindra telah melakukan perdagangan manusia. Kalimat “*salah stau rakyatnya diperdagangkan, min*” ini menjadi suatu hal yang kontras. Cuitan ini pun dibalas oleh @DeenRaHS, “*maju aja sendiri sono wkwk*” menjadi sebuah ungkapan bahwa rakyat tidak kebersamai apa yang dilakukan Gerindra.



Gambar 4.17 Teks yang diproduksi oleh @wisnu\_wii

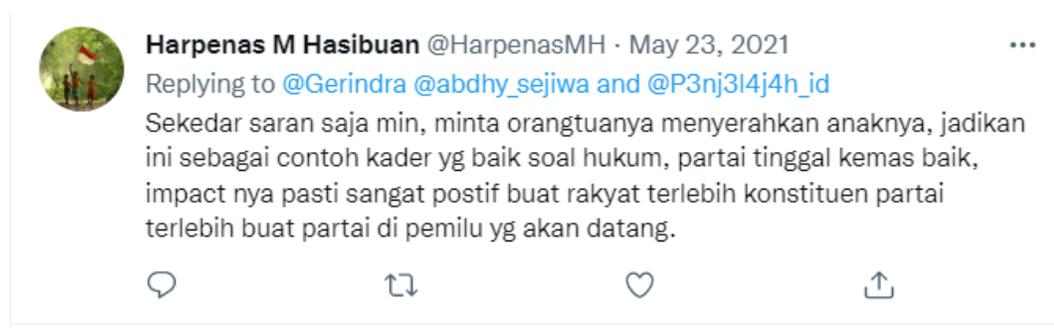
Tak hanya itu, gambar 4.17 menunjukkan akun Twitter @wisnu\_wii dengan kalimatnya “*padahal gak perlu ditanggapi*” bermaksud lebih baik Gerindra untuk tidak buka suara, dibanding harus menunjukkan sebuah sikap negatif yang membuat warganet *ilfeel*. Kata *ilfeel* sendiri merupakan serapan dari kosakata bahasa Inggris yaitu *ill feel* yang pada dasarnya, digunakan seseorang dalam menggambarkan ketidaksukaannya terhadap suatu objek, terutama orang lain. Perasaan *ilfeel* ini hampir sama dengan perasaan jijik, muak, atau risih terhadap perlakuan orang lain, baik yang ditujukan kepadanya maupun kepada orang lain, di mana dalam hal ini @wisnu\_wii merasakan perasaan *illfeel* dan tidak ingin memilih Gerindra akibat partai tersebut meremehkan pengalaman perkosaan, hanya karena sang anak bukanlah kader.

Gerindra pun seakan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi atas kasus pemerkosaan tersebut. Padahal, setiap kasus kekerasan seksual di Indonesia punya urgensi yang tinggi untuk selalu dikawal. Apalagi, mengingat untuk saat ini kepastian dan perlindungan hukum masih kurang dan membuat para korban semakin takut untuk melaporkan soal tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam hal ini, seharusnya Gerindra sebagai partai politik yang ikut terseret, demi menjaga citranya maka penting untuk menyampaikan informasi positif di balik kejadian seperti proses hukum yang dijalani hingga tuntas. Ini juga berfungsi sebagai edukasi kepada masyarakat agar menyadari cara yang baik dalam menghadapi masalah serupa, sehingga penting untuk memahami perspektif gender tentang korban kekerasan seksual.



Gambar 4.17 Teks yang diproduksi oleh @xibubul

Persepsi yang sama juga dicuitkan oleh beberapa akun Twitter lain, seperti @xibubul yang merasa Gerindra sudah seharusnya melakukan tindakan tegas, karena itu bisa memengaruhi citra partai. *“Jangan harap ada yang milih di 2024 lah min, kalo atasan lo gaberani ambil sikap”* Cuitan ini dikirimkannya setelah melihat bagaimana Gerindra sejak awal hanya berkilah di bawah kalimat *“anaknya bukan kader”* dan beberapa cuitan lainnya yang hanya menginformasikan prosedur sebagai informasi belaka tanpa ikut mengawal proses tersebut dengan ikut memeriksa kader lewat internal partai. Persepsi sendiri merupakan hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya mengenai suatu produk. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Sementara, menurut (Soemirar, 2005) sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu.



Gambar 4.18 Teks yang diproduksi oleh @HarpenasMH

Akun twitter @HarpenasMH juga membahas seputaran langkah strategis dan bagaimana citra Gerindra menjadi baik untuk urusan elektoral *“sekedar saran aja min, minta ortunya menyerahkan anaknya, jadikan ini sebagai contoh kader yang baik soal hukum, partai tinggal kemas baik, impactnya pasti sangat positif buat rakyat lebih konstituen partai terlebih buat partai di pemilu yang akan datang,”* di mana politikus dapat memberikan pengaruh tersendiri, termasuk citra lembaga politik. Terkait hal ini,

Anang (2017) memberikan penjelasan bahwa realitas masyarakat Indonesia menunjukkan semacam kecenderungan untuk memberikan suara dalam pemilihan kepada orang atau kandidat yang sesuai dan ideal menurut pandangannya.



Gambar 4.19 Teks yang diproduksi oleh @Ariefwiibowo

Citra ideal yang dimaksud oleh @HarpesnasMH seperti kesediaan kader untuk terus mengawal kasus, mengingat pelakunya datang dari sang anak sehingga ini bisa memberikan tanda bahwa kader tersebut punya moralitas yang baik. Citra politik bisa semakin menguat ketika apa yang dicitrakan seorang tokoh sesuai dengan realitas yang dicitrakan. Sebaliknya, ketokohan seseorang akan hancur ketika apa yang dicitrakan mengabaikan dimensi moral, seperti kader yang hanya berdiam diri dan partai politik Gerindra yang tidak menunjukkan kekuatannya guna mendorong pihak kepolisian untuk segera menangani kasus pemerkosaan.

Sejalan dengan itu, akun twitter @Ariefwiibowo mencuitkan “*gini lho min bapaknya kan kader, nah kalau sebagai bapak aja gak bisa ngurusi keluarganya, apalagi anaknya bejat gitu dan bapaknya cenderung diam dan belum di tangkap juga. Ya buat intopeksi kita aja buat 2024 jangan pilih bapak ini lagi, bisa juga merembet kader gerindra yang lain,*” Soemirat dan Ardianto (2004) mengatakan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah subyek. Kalimat “*bisa juga merember kader gerindra yang lain*”, menjadi efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra sebuah institusi. Dari sini, artinya sikap-sikap yang dilakukan oleh kader menjadi tolok ukur bagi publik untuk memilih atau tidak memilih. Sudah banyak contoh politisi yang jatuh akibat moralitas yang kurang baik.

Berdasarkan M Alfian (2009), ketika masyarakat mempersepsikan moralitas politisi itu buruk, mereka menganggapnya tidak layak untuk dipilih. Banyak warganet yang menganggap @Gerindra sudah menunjukkan wajah buruk sebagai politisi, yang tidak benar-benar mendukung kepentingan rakyat dan tidak memberikan perwujudan rasa aman bagi sekelompok orang, bahkan seakan lepas tangan dan tidak ingin mencampuri urusan pemerksaan, meski pelaku bukanlah bagian dari kader Gerindra.



Gambar 4.20 Teks yang diproduksi oleh @demozkratoz

Gambar 4.20 menunjukkan akun @demozkratoz mencuitkan “*Gimana mau ngatur rakyat kalau ngatur anak dan kader sendiri aja nggak bisa. Fix dah gua bakal meng-encourage kawan-kawan untuk gak milih nih partai,*” Adapun, Cambridge Dictionary mengartikan kata ‘*encourage*’ sebagai istilah mendorong atau menganjurkan. Lebih jelasnya lagi, ‘*encourage*’ adalah bentuk stimulasi sebuah aktivitas atau cara pandang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini @demozkratoz akan memberikan stimulasi berupa dorongan pada lingkungan sekitarnya untuk tidak memilih partai Gerindra, sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterima Gerindra atas sikapnya yang membingungkan masyarakat dan hal tersebut bisa berdampak negatif pada urusan pemilihan mereka yang nantinya tidak mendapat banyak dukungan dari warganet akibat adanya kasus ini. Ucapan ini mengandung pemikiran bahwa dengan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui partai politik dapat menciptakan politisi yang berintegritas, apabila keberadaan partai politiknya sudah berintegritas,

jika partai politik belum masuk dalam sistem integritas niscaya politisi yang dihasilkan oleh partai politik tersebut tidak berintegritas.



Gambar 4.21 Teks yang diproduksi oleh @narrygalloeng

Akun @narrygalloeng juga mencuitkan dengan tendensi yang sama soal stimulasi, “*kita tau kan kawan apa yang harus kita lakukan nanti*” adapun kalimat “*lakukan nanti*” bermaksud sudah adanya rencana untuk tidak memilih Gerindra atas *track record* yang terjadi. Bertumbuhnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap politik dan partai politik. Masyarakat tidak mau sekedar ditempatkan sebagai massa pasif yang dimobilisasi atas kepentingan melainkan mendudukkan diri sebagai massa aktif yang turut dalam menentukan arah dan dinamika politik. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh massa aktif merupakan representasi trauma politik berupa ketidakpercayaan terhadap partai politik.

Krisis partai politik berupa masalah-masalah yang mendera partai baik berupa gejala internal maupun kasus yang masuk ranah hukum dan peradilan soal moralitas telah membuat apatisisme politik. Partai politik perlu menyusun ulang tentang bagaimana membangun komunikasi politik dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan merebut kembali kepercayaan itu, dan diperlukan tata cara kelola masalah ketika partai dan kader diterpa persoalan sehingga dampak yang ditimbulkan mampu dikontrol. Dan Nimmo (2000:202-205) menyebutkan tiga teori umum tentang peran komunikasi dalam Pemilihan Umum yaitu: teori kehendak rakyat, teori kontrol rakyat dan teori dukungan rakyat.

Teori kehendak rakyat memiliki fokus kognisi, dalam hal pemberi suara berorientasi kepada tujuan yang kentara dan tertentu serta memiliki minat aktif terhadap kampanye pemilihan umum dan memiliki pengetahuan yang memadai serta menggunakan suara mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan tindakan politik.

Teori kontrol rakyat memiliki fokus pada afeksi. Teori ini menekankan bahwa pemberi suara yang berorientasi kepada partai dengan pertimbangan berdasarkan standar kepartaian dan ideologi. Sementara, teori dukungan rakyat memiliki fokus pada ekspresif dan bukan instrumental atau evaluatif dan bukan kognisi atau afeksi. Dalam teori ini pemberi suara menyusun citra tentang kandidat atau partai beserta harapannya untuk mengukuhkan kembali kepercayaan kepada rasionalitas fundamental sehingga dapat menentukan kembali tindakan yang sesuai dengan tujuan pada masa mendatang.



Gambar 4.22 Teks yang diproduksi oleh @muridseneca dan @chocenthu

Tak hanya itu, untuk memperluas jangkauan, para pengguna Twitter dapat menambah penyebutan (*mention*) di akun-akun tertentu. Seperti yang dilakukan oleh @muridseneca yang melakukan mention kepada @chocenthu terkait pilihan politiknya. Gambar 4.22 mencuitkan soal pertanyaan dari @muridseneca “*yakin masih mau milih Gerindra karena adminnya humoris?*” Cuitan ini pun dibalas oleh pemilik akun @chocenthu, “*humoris hanyalah gimmick, aslinya keliatan kan sekarang whoops*” adapun istilah “*gimmick*” merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) sebagai alat atau trik yang digunakan untuk menarik perhatian. Gimmick dapat diterapkan sebagai salah satu cara menarik perhatian audiens di dalam berbagai bidang mulai dari bidang marketing, media, politik, hingga pendidikan. Adapun, khusus untuk media sosial Twitter, Gerindra menggunakan *gimmick* dengan cara menjadi akun yang aktif dan interaktif. Sebab, hanya di Twitterlah balasan komentar bisa tampil di beranda, sehingga aktif dan tidaknya satu akun bisa sangat terlihat melalui tweet atau balasan-balasan atas banyak pertanyaan yang dilontarkan kepadanya.

Sebagai partai yang tidak terlalu punya kesan muda, Gerindra boleh dibilang cukup berhasil membangun *audience* dan perhatian generasi milenial dan generasi z di Twitter melalui konten-konten ringan dan gaya percakapan anak milenial. Di mana, akun ini mengambil ceruk-ceruk tema *relationships* yang kalau di-*break down* isinya adalah soal cinta, selingkuh, rindu, *move on*, dan sebagainya. Mereka juga tak segan-segan membagi-bagikan bingkisan melalui giveaway selayaknya akun-akun selebtwit yang mendapat *endorse*. Sehingga, tak salah apabila akun ini sering dianggap humoris oleh sebagian warganet, karena orang yang beda partai pun sampai bisa ikut menikmati tweet-tweet dan balasan-balasan dari akun Gerindra.

Namun, segala prestasi yang dibangun dengan susah payah melalui banyak interaksi yang menghasilkan ribuan tweet rusak begitu saja karena satu tweet yang dibuat oleh Gerindra mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dari seorang kader Gerindra. Fenomena yang terjadi ini dapat dijelaskan oleh (Martin, 2008), yang mengatakan bahwa citra yang ideal adalah kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti citra yang seharusnya “dipoles agar lebih indah dari warna aslinya” karena hal itu justru dapat menghancurkannya. Dalam hal ini, *humoris hanyalah gimmick,*” menjadi anggapan bahwa Gerindra sebenarnya hanya menampilkan citra humoris demi mendekati diri terhadap milenial, tapi ternyata partai ini tidak sepenuhnya peduli pada publik yang ditimpa oleh masalah. Kegagalan pesan politik dan *marketing* politik berupa produk-produk politik akan membentuk

fenomena baru dalam politik yakni massa defenders yaitu massa yang menolak terhadap kebijakan rezim yang akan berkuasa (Maridjan, 2010:132).



Gambar 4.23 Teks yang diproduksi oleh @Kittokatsuuuuu, @xxxnation97, @sukanyanyiii dan @primsoxmary

Gambar 4.23 menunjukkan akun @primrosxmary yang menyebutkan, bahwa upaya Gerindra menarik perhatian generasi Z selama ini, seakan sirna akibat blunder yang dilakukannya. Kalimat “*eeh malah blunder*” ini seakan menjadi penanda bahwa usaha yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan harapan, bahkan kini warganet mengalami krisis kepercayaan publik di media sosial, apalagi dengan banyaknya cuitan berupa peringatan soal ‘jejak digital’ yang membuat warganet tidak lupa sekaligus bisa diangkat ke kasus Pemilu 2024 yang jadi pertimbangan publik dan bisa diangkat ke

kasus Pemilu. Jejak digital erat kaitannya dengan ingatan kolektif dikembangkan oleh Frederick Bartlett melalui bukunya *Remembering* dalam Akmaliah (2017).

Secara garis besar Bartlett berpendapat bahwa proses seseorang mengingat itu bergantung kepada skema masa lalunya, khususnya ketika seseorang mengingat kembali atas satu peristiwa yang terjadi. Dalam konteks politik nasional, politik ingatan ini digunakan untuk menguji sejauhmana konsistensi ucapan seseorang dalam rentang waktu tertentu. Dengan Twitter sebagai arsip *digital* dan *screenshot* sebagai bukti rekam, orang tidak hanya mencari lebih detail mengenai latar belakang politisi/lembaga melainkan juga ucapan-ucapannya yang dimuat, baik di media online ataupun media sosial terkait dengan konsistensinya, apakah ia masih konsistensi atau justru bertolak belakang, ini seperti yang dicuitkan oleh pemilik akun @Kittokatsuuuuu yang menuliskan “*screenshot telah berhasil, sampai jumpa di 2024 dalam kasus HAM,*” kasus HAM memang selalu menjadi serangan musiman kepada Prabowo dan hal ini tak bisa dihindari dari debat nantinya.

Akun @sukanyanyiiii juga menyebutkan “*kalo Gerindra enggak tegas, mantep nih buat goreng kasus 2024,*” ini seakan menyiratkan, jika partai politik tidak pernah benar-benar serius menjawab kasus pemerkosaan itu, bahkan tak punya jawaban yang valid untuk membantah tuduhan bahwa Gerindra tidak membela kader dan cenderung melakukan *defend*, maka beberapa pihak akan memanfaatkan momentum itu untuk menyerang sesuai dengan kepentingan, tentu tidakan tersbeut mampu membuat elektabilitas partai akan terpengaruh dan makin menurunkan citra partai Gerindra itu sendiri.



Gambar 4.24 Teks yang diproduksi oleh @Who\_knows00 dan @lang\_giii

Terkait pengaplikasian dari istilah ‘jejak digital’ itu sendiri, sudah langsung bisa tercermin di salah satu interaksi dari pengguna akun @Who\_Knows00 yang mengatakan bahwa kasus ini menjadi pengingat publik untuk tidak perlu percaya apa yang dikatakan oleh Gerindra, utamanya soal perlindungan perempuan dan kasus pemerkosaan dan secara cepat pengguna @lang\_giii ikut merespon dengan melakukan *quotes tweet* berupa cuitan Gerindra yang diunggah di Mei 2021 soal hak kesetaraan, perlindungan, kesejahteraan dan kesamaan dalam hak hidup. Hal tersebut menunjukkan Gerindra terkesan inkonsistensi dan punya standar ganda dalam membela beberapa kasus yang ada.

Dalam hal ini, upaya menjaga kredibilitas Parpol melalui citra yang positif sangat penting, namun pada prakteknya tidak mudah bahkan kerap kali kontradiktif. Publik masih ingat ketika beberapa hari yang lalu sikap Gerindra terkesan tidak empati pada kasus pemerkosaan, namun beberapa hari setelahnya warganet dkasusguhi janji

Partai Politik sebagai Parpol yang selalu memberikan kesetaraan, kesejahteraan, perlindungan dan kesamaan dalam mendapatkan hak-hak hidup di Indonesia.



Gambar 4.25 Teks yang diproduksi oleh @mazzini\_gsp

Tak hanya itu, pemilik akun @mazzini\_gsp yang juga merupakan Key Leader Opinion dalam bidang ahli sejarah, sengaja menyisipkan video Rahayu Saraswati ketika diundang di salah satu *podcast* dan secara jelas mengkritisi melalui bukti tayangan *podcast* dari Rahayu Saraswati mempertanyakan mengapa respon yang dimiliki akun Twitter @Gerindra belum memperlihatkan apa yang diupayakan oleh Rahayu selama ini. “Padahal di partai @Gerindra ada orang macam @RahayuSaraswati yang ber-image lantang soal kasus pelecehan, pemerkosaan dan *human trafficking*. Tapi, pas kelakuan begitu menimpa keluarga salah satu kader Gerindra kok sikapnya malah terkesan berbalik min?” Adanya cuitan yang dikemukakan oleh @mazzini\_gsp seakan menagih tindakan tegas, mengingat partai

tersebut sedang diterpa *bad news* seputar kasus pemerkosaan. Tweet ini pun mencapai interaksi sebanyak 230 *retweets* dan 766 *likes*.

Tentu dari segala interaktivitas warganet, dapat disimpulkan, meski tiap kasus merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi, namun untuk kasus yang secara tidak langsung melibatkan kader tetap saja mempengaruhi elektabilitas partai. Setiap partai politik (parpol) memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gerry Ferguson, *Corruption and Criminal Liability* dalam *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana* (2014) menjelaskan bahwa pemikiran dan perilaku dari kader bisa menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia. Setiap kader parpol seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik. Sehingga penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara, menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik. Apalagi, fakta bahwa suatu korporasi adalah sebuah abstraksi yang tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri, sehingga kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut.

Berdasarkan pemikiran Sigit Pamungkas terkait *Partai politik Teori dan Praktik di Indonesia* dalam Ethan (2019) menyebutkan, dengan berkurangnya dukungan rakyat maka kesempatan partai politik untuk mewakili visi misi pendukungnya menjadi lebih sedikit. Karena partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka partai tersebut akan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga penting untuk partai politik punya komitmen dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, benar sesuai prinsip demokrasi.

Sehingga, analisis atas interaktivitas warganet soal kasus pemerkosaan ini memuat unsur yang cukup lengkap dengan detail penyampaian tuturan langsung yang disampaikan berbagai warganet dari hari ke hari, mulai 19 Mei 2021 hingga 27 Mei

2021. Wacana ini juga dapat dinilai koheren karena unsur-unsur penjelasan topiknya saling mendukung atau dapat dikatakan sub-topik yang ada saling mendukung topik atau tema wacana dari warganet soal kecemannya terhadap balasan Gerindra soal kasus pemerkosaan.